

**ANALISIS ALOKASI DANA BANTUAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN PADA DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

ZHRUN EFENDI

NIM : 15622129



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**ANALISIS ALOKASI DANA BANTUAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN PADA DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH

ZHRUN EFENDI

NIM : 15622129



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS ALOKASI DANA BANTUAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN PADA DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh

ZHRUN EFENDI
NIM : 15622129

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak. CA
NIDN. 1028117701 / Asisten ahli

Pembimbing Kedua,



Afriyadi, S.T., M.E.
NIDN. 1003057101 / Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS ALOKASI DANA BANTUAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NELAYAN PADA DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG**

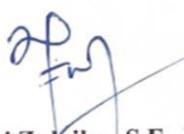
Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

ZHRUN EFENDI
NIM : 15622129

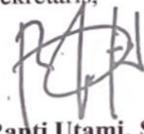
Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Tiga Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua Dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

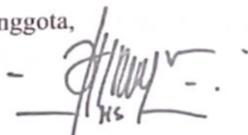
Ketua,


Nurfitri Zulaika. S.E., M.Ak.Ak. CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Sekretaris,


Ranti Utami. S.E., M.Si., AK., CA
NIDN. 104117701 / Lektor

Anggota,


Hendy Satria .S.E., M.AK.
NIDN. 1015069101 /Lektor

Tanjungpinang, 23 Agustus 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,
Ketua,



Charly Marlinda. SE. M. Ak. Ak. CA
NIDN: 1029127801 /Lektor

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZHRUN EFENDI
NIM : 15622129
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif : 2.99
Program Studi/ Jenjang : Akuntansi / Strata 1
Judul Skripsi : **ANALISIS ALOKASI DANA BANTUAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NELAYAN PADA DINAS PERTANIAN,
PANGAN, DAN PERIKANAN KOTA
TANJUNGPINANG**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 23 Agustus 2022

Penyusun



ZHRUN EFENDI
NIM: 15622129

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”

(Qs. Al Insyirah: 6 - 8)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS ALOKASI DANA BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG”** ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Dalam proses penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak. CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si. Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E. Ak. M.Si. CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Ibu Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dengan banyak kesabaran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan, petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Afriyadi, S.T., M.E., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Tanjungpinang, 23 Agustus 2022
Penulis

ZHRUN EFENDI
NIM: 15622129

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Batasan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5.1. Kegunaan Ilmiah.....	8
1.5.2. Kegunaan Praktis	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Teori.....	11
2.1.1. Akuntansi.....	11
2.1.1.1. Pengertian Akuntansi.....	11
2.1.1.2. Pengertian Akuntansi Publik.....	12

4.1.1.4.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang	32
4.1.2.	Karakteristik Informan	33
4.1.2.1.	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	33
4.1.2.2.	Karakteristik Informan Berdasarkan Jabatan	34
4.1.3.	Anggaran Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	35
4.1.3.1.	Alokasi Dana Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	36
4.1.3.2.	Alokasi Dana Bidang Pertanian Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	37
4.1.3.3.	Alokasi Dana Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	38
4.1.3.4.	Alokasi Dana Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	39
4.2.	Pembahasan	43
4.2.1.	Alokasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	43
4.2.1.1.	Perencanaan Alokasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021 ...	44
4.2.1.2.	Pengelolaan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Dinas	

	Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	46
4.2.1.3.	Pertanggungjawaban Alokasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	47
BAB V	PENUTUP	52
	5.1. Kesimpulan	52
	5.2. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Hal
1	Program Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	4
2	Anggaran Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	35
3	Alokasi Dana Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	36
4	Alokasi Dana Bidang Pertanian Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	37
5	Alokasi Dana Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	38
6	Alokasi Dana Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	39
7	Alokasi Dana Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	40
8	Alokasi Dana Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	41
9	Alokasi Dana Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2021	42
10	Realisasi Belanja Alokasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tahun Anggaran 2021.....	47

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Hal
1	Kerangka Pemikiran	17
2	Triangulasi Data	26
3	Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang	31
4	Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin_____	33
5	Karakteristik Informan Berdasarkan Jabatan.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Pedoman Wawancara Tambahan
4	Transkrip Wawancara Tambahan
5	Dokumen Anggaran
6	Dokumen Rencana
7	Surat Pernyataan
8	Dokumentasi Penelitian
9	Hasil Cek Plagiarism

ABSTRAK

ANALISIS ALOKASI DANA BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG

Zahrun Efendi, 15622129. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
efendizahr@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alokasi dana bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji keabsahan data dengan triangulasi data.

Hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa proses alokasi dana bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang dimulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, realisasi anggaran bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan pada program pengembangan kapasitas nelayan kecil ini yaitu Rp. 267.241.778,00 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan capaian 98,62%.

Kata Kunci : Alokasi, Dana, Bantuan, Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan.

Dosen Pembimbing : 1. Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak.
2. Afriyadi, S.T., M.E.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ALLOCATION OF SUPPORT FUNDS FOR THE EMPOWERMENT OF FISHING COMMUNITIES AT THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FOOD, AND FISHERIES TANJUNGPINANG CITY

Zahrhun Efendi, 15622129. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
efendizahrhun@gmail.com

This study aims to determine the allocation of assistance funds for the empowerment of fishing communities at the Agriculture, Food, and Fisheries Service of Tanjungpinang City.

The type of research used in this study is descriptive qualitative. The data type used consists of primary data and secondary data. The data collection techniques used in this study were interviews and literature studies. Data processing techniques in this study consist of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data analysis technique in this study was carried out by testing the validity of the data by triangulation of data.

The results of this study are that it is known that the process of allocating funds for the empowerment of fishing communities at the Tanjungpinang City Agriculture, Food, and Fisheries Service starts from planning, management, and accountability.

The conclusion of this study is based on the results of the research conducted, the realization of the budget for assistance for empowering fishing communities in this small fishermen capacity development program is Rp. 267,241,778.00 (Two Hundred and Sixty-Seven Million Two Hundred forty-One Thousand Seven Hundred and Seventy-Eight Rupiah) with an achievement of 98.62%.

Keywords: Allocation, Funds, Assistance, Empowerment, Fishing Communities.

Supervisors Lecturer : 1. Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak.Ak.
2. Afriyadi, S.T., M.E.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah untuk mendayagunakan masyarakat agar menjadi lebih baik lagi dengan berbagai cara mulai dari memberikan pelatihan kepada masyarakat, memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan pengembangan kepada masyarakat, hingga memberikan bantuan kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan sudah seyogyanya pemerintah berperan aktif untuk hadir membantu dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata memperoleh mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya atau kemampuan. Makna kata pemberian menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya, kemampuan, atau kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Pihak lain yang dimaksud salah satunya ialah pemerintah.

Kehadiran pemerintah untuk membantu dan memberdayakan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai program-program kegiatan yang dilaksanakan

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lebih dikenal dengan SKPD. Setiap SKPD dibentuk berdasarkan fungsi dan tujuan yang nyata untuk dapat membantu pemerintah daerah mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Salah satu dinas yang mendapatkan alokasi anggaran pemerintah daerah yaitu Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang. Tujuan dibentuknya SKPD ini adalah untuk membantu pemerintah daerah atau walikota dalam menangani permasalahan terkait pertanian, pangan, dan perikanan di Kota Tanjungpinang. Salah satu program kerja DPPP Kota Tanjungpinang adalah untuk memberdayakan masyarakat nelayan di Kota Tanjungpinang dengan berbagai cara termasuk pemberian bantuan.

Dalam memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan di Kota Tanjungpinang, DPPP Kota Tanjungpinang telah mengalokasikan dana untuk melaksanakan program tersebut. Alokasi dana merupakan proses dalam pengelolaan sumber daya keuangan mulai dari pengalokasian sumber daya dan mengatur operasional kegiatan guna mendukung efisiensi dan efektivitas (Kehik & Mael, 2017). Menurut (Kehik & Mael, 2017) prinsip dalam pengalokasian dana adalah kesesuaian antara program kerja dengan kebutuhan masyarakat.

Fenomena permasalahan terkait alokasi dana bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan pada DPPP Kota Tanjungpinang berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, yaitu adanya fokus pada pihak-pihak tertentu dalam pengalokasian sumber daya keuangan bantuan kepada masyarakat nelayan yang telah mengembangkan budidaya perikanan, namun bagi masyarakat nelayan yang tidak melakukan budidaya perikanan bukan menjadi fokus dalam pengalokasian

dana bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan. Kemudian penyaluran bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan juga dinilai kurang efektif dan efisien karena tidak semua program kerja dapat dilaksanakan, sehingga pertanggungjawaban terhadap alokasi dana tersebut perlu dianalisis lebih mendalam lagi.

Selain itu, fenomena lainnya yang penulis temukan terkait alokasi dana bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan pada DPPP Kota Tanjungpinang dari wawancara singkat yang dilakukan kepada salah seorang masyarakat yaitu kurangnya transparansi akuntabilitas, pendayagunaan, serta pengalokasian dana yang ada. Sebagaimana yang terlihat bahwa dalam menyusun kegiatan perencanaan program DPPP Kota Tanjungpinang, alokasinya hanya terfokus pada masyarakat yang telah melakukan usaha budidaya seperti memberikan bimbingan, pemantauan, dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tidak melakukan budidaya tidak mendapatkan bantuan atau tidak teralokasikan oleh anggaran yang disusun DPPP Kota Tanjungpinang.

Berikut merupakan data yang diperoleh tentang program Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dalam rencananya selama tahun anggaran 2020 yang diperoleh dari dokumen Rencana Strategis DPPP tahun 2018 – 2023 yaitu sebagai berikut ini:

Tabel 1.1
Program Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan

Seksi Bidang	No	Program Kegiatan
Perikanan Budidaya	1	Penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing
	2	Pemberian bimbingan, pemantauan, dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan
	3	Pembuatan <i>Aquacard</i>
	4	Sosialisasi kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan
	5	Pemberian bantuan bibit dan pakan perikanan budidaya
	6	Pengadaan keramba apung dan peralatan jaring
Perikanan Tangkap	1	Penyediaan dukungan serta bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, alat penangkap ikan, serta alat bantu penangkapan ikan
	2	Pembuatan kartu nelayan dan kartu asuransi nelayan
	3	Penerbitan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi jenis tertentu bagi usaha nelayan dengan kapal berukuran sampai dengan 5 GT
	4	Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia perikanan tangkap
	5	Pemberian armada sampan fiber, jaring, dan bubu
Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan	1	Kegiatan pemberdayaan usaha kecil perikanan
	2	Pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu dan daya saing hasil perikanan bagi usaha kecil perikanan
	3	Kegiatan peningkatan produksi, pemasaran, dan promosi hasil usaha kecil perikanan.

Sumber : *RENSTRA DPPP 2018 (2021)*.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, maka dapat diketahui beberapa program kerja bantuan masyarakat yaitu seperti pembuatan *aquacard*, pemberian bantuan bibit dan pakan perikanan budidaya, pengadaan keramba apung dan peralatan jaring, penyediaan dukungan serta bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, alat penangkap ikan, serta alat bantu penangkapan ikan. Setiap program kerja tersebut pastinya menyerap anggaran yang berasal dari APBD Kota Tanjungpinang ataupun berasal dari pendapatan transfer berupa dana alokasi khusus. Sehingga, perlu kejelasan alokasi dana dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Kejelasan alokasi dana dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat merupakan bentuk transparansi keuangan pemerintah kepada publik. Pemerintah sudah semestinya mengalokasikan dana yang ada secara transparan dan bertanggungjawab untuk pemberdayaan masyarakat. Terlebih lagi, masyarakat pesisir ataupun masyarakat nelayan yang ada di Kota Tanjungpinang. Dalam menganalisis alokasi dana dapat melihat pada pengalokasian sumber daya yaitu pengelolaan dana harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik. Kemudian operasional kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasian dana itu sendiri.

Aturan Dana Alokasi Khusus untuk bidang perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa dana bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan yang termasuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan bertujuan untuk menjamin terlaksananya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu membangun kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kemudian untuk meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan (Permen KKP Nomor 63 Tahun 2020).

Peraturan tentang alokasi dana pemberdayaan masyarakat nelayan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pemberian bantuan seperti pembiayaan dan permodalan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (PP No.50 Tahun 2015).

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Suryana & Bahari, 2020) dengan judul “Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Nelayan Minapolitan Desa Tideng Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung)”. Hasil penelitian menunjukkan program pemberdayaan terdiri dari sosialisasi program minapolitan, penetapan kelompok sasaran program minapolitan, dan pembentukan kelompok nelayan. Sehingga alokasi dana akan difokuskan pada program tersebut yang merupakan bentuk upaya meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan Perikanan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Arnawa et al., 2016) dengan judul “Dampak Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali” dalam Jurnal Akuntansi Manajemen Agribisnis, Volume 4, Nomor 1, ISSN: 2355 – 0759. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Gianyar semenjak tahun 2008 hingga tahun 2013 telah mengalokasikan dana bantuan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bantuan pengadaan sarana perikanan tangkap yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta mutu hasil usaha perikanan tangkap skala usaha kecil. Jenis bantuan sarana perikanan tangkap tersebut berupa jakung, mesin motor tempel, pancing, dan jaring.

Berdasarkan uraian permasalahan dan penelitian terdahulu di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS ALOKASI DANA BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun untuk penelitian ini yaitu “Bagaimana Alokasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang?”

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus sebagaimana rumusan masalah di atas, maka diperlukan suatu batasan masalah. Dalam penelitian ini batasan masalah yang digunakan yaitu alokasi dana bantuan pemberdayaan masyarakat

nelayan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian yaitu “Untuk mengetahui Alokasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang”.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni sebagai berikut :

1.5.1. Kegunaan Ilmiah

Bagi penulis penelitian ini tidak hanya sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, tetapi juga diharapkan dapat menjadi sarana pengaplikasian ilmu teoritis yang telah didapatkan yang dapat memberikan wawasan tambahan dalam penerapan teori konseptual dan meningkatkan kematangan berpikir. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis kedepannya agar lebih baik lagi.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi publik tentang Alokasi Dana Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat mengambil kebijakan lebih baik lagi.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis susun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis dalam BAB I menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis dalam BAB II akan membahas tentang tinjauan teori, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Penulis dalam BAB III akan membahas jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam BAB IV akan membahas tentang hasil penelitian berupa gambaran umum, karakteristik informan, dan anggaran yang dianalisa. Pada bab ini juga akan dilakukan pembahasan tentang hasil analisa alokasi dana.

BAB V : PENUTUP

Penulis dalam BAB V akan membahas tentang kesimpulan penelitian dan juga saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingans.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Akuntansi

2.1.1.1. Pengertian Akuntansi

Menurut West Churman akuntansi adalah pengalaman tertulis yang berguna untuk pengambilan keputusan dan pengalaman yang tersusun berharga bagi pembuatan pilihan (Mulyadi, 2012). Kemudian menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA) akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya, dan meringkas dengan cara tertentu dalam ukuran fiskal, pertukaran dan kesempatan yang pada umumnya bersifat moneter dan dalam menguraikan hasil.

Menurut Rudianto akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha (Hariati & Rihatingtyas, 2017). Kemudian menurut Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Menurut (Eden, 2019) secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kemudian

menurut Littleton tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodic antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian, keputusan yang jelas dan tegas bagi semua yang menggunakan informasi akuntansi tersebut.

2.1.1.2. Pengertian Akuntansi Publik

Menurut Indra Bastian akuntansi sektor publik adalah sebuah mekanisme teknik serta analisa akuntansi yang dijalankan untuk mengelola dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya (Sugiarto, 2012). Kemudian menurut Purba (2015) pengertian akuntansi sektor publik adalah alat informasi baik itu untuk pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi untuk publik.

Menurut Abdul Halim arti akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dengan tujuan untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang memiliki sifat keuangan dari entitas pemerintah guna untuk mengambil keputusan ekonomi yang nalar dari pihak berkepentingan atas dasar alternatif arah tindakan (Andayani, 2015). Kemudian menurut Beneish et al. (2012) pengertian akuntansi keuangan daerah atau akuntansi sektor publik adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, serta melaporkan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi yang dibutuhkan pihak eksternal.

Menurut Erlina pengertian akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang dipakai untuk mencatat peristiwa ekonomi dalam organisasi non *profit* atau nirlaba. Akuntansi sektor publik banyak digunakan oleh organisasi sektor publik seperti

masjid, partai politik, masyarakat, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain (Yendrawati, 2013).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan akuntansi publik adalah akuntansi yang dipakai untuk mencatat peristiwa ekonomi dalam organisasi non profit yang tujuannya untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang memiliki sifat keuangan dalam pemerintahan yang berfungsi sebagai pengelola dana masyarakat.

2.1.2. Alokasi Dana

2.1.2.1. Pengertian Alokasi Dana

Menurut Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 disebutkan bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan alokasi dana atau Dana Alokasi Khusus (DAK) guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Permen KKP Nomor 63 Tahun 2020).

Dalam alokasi dana pemberdayaan masyarakat nelayan disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pemberian bantuan seperti pembiayaan dan permodalan dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (PP No.50 Tahun 2015).

Menurut (Putra, 2018) alokasi dana yaitu salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah dengan dinas terkait. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki dinas terkait. Kemudian menurut (Putra, 2018) alokasi dana ialah perolehan bagian keuangan dinas yang dari kota yang penyalurannya melalui kas dinas. Alokasi dana dimaksudkan untuk membiayai program kerja dinas dalam melaksanakan aktivitas serta pemberdayaan masyarakat. Adapun maksud pemberian alokasi dana adalah untuk membiayai program kerja dinas dalam melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui jika alokasi dana yaitu kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari APBN yang akan disalurkan ke setiap dinas yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2.1.2.2. Indikator Alokasi Dana

Menurut Aljannah (2017) dalam menganalisis alokasi dana dapat menggunakan indikator yaitu:

1. Pengalokasian sumber daya

Pengelolaan dana harus dilaksanakan dengan menyeluruh tanpa ada fokus kepada pihak-pihak yang spesifik.

2. Operasional kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas

Pengelolaan dana dilakukan secara efektif dan efisien, semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi alokasi dana, dapat pula menggunakan indikator kerangka kerja logis yang pada umumnya terdiri dari 5 elemen utama yaitu (Bappenas, 2014):

1. Masukan (*Input*)
2. Keluaran (*Output*)
3. Hasil (*Outcome*)
4. Manfaat (*Benefit*)
5. Dampak (*Impact*)

Indikator alokasi dana yang dapat digunakan untuk mengukur dana bantuan masyarakat nelayan dapat menggunakan tujuan dari alokasi dana atau DAK dalam aturan Peraturan Menteri KKP Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 yaitu (Permen KKP Nomor 63 Tahun 2020):

1. Membangun kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

2.1.2.3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

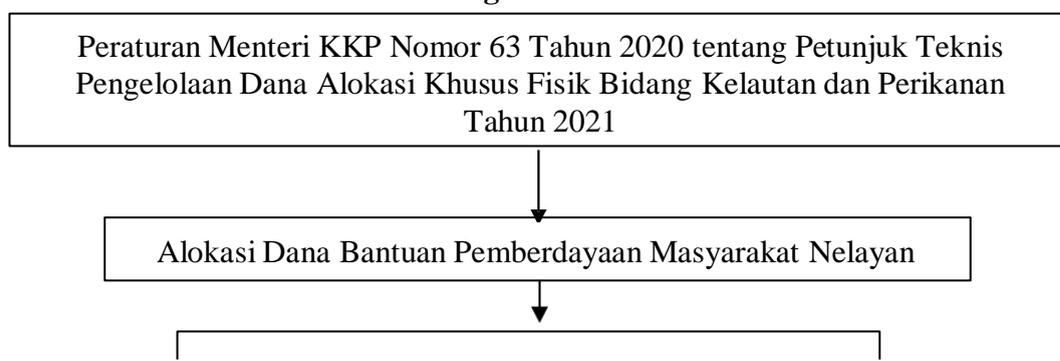
Pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut (Eden, 2019) secara ringkas dapat dikemukakan sebagai perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, yaitu perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan pada masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

Pemberdayaan ekonomi rakyat ialah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar, karena kendala pengembangan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural, perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian (Nafidah, 2017).

Menurut (Prakarsa, 2020) pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Program pemerintah untuk pembangunan yang belum tercapai dalam menuntaskan kemiskinan di sebagian masyarakat tentunya hal ini perlu untuk diperkuat dalam menghadapi tantangan hidup yang ada dan semakin hari tidak bisa terkendali dan susah untuk ditebak.

2.2. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : *Konsep yang diolah (2021)*

2.3. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Kehik & Mael, 2017) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana di desa Usapinonot telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan kebutuhan masyarakat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Marlina & Ramadani, 2020) dengan judul “Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Keluarga Pra Sejahtera di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Barat” dalam jurnal AKBIS, volume 1, nomor 1, ISSN: 2331 – 6884. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap kehidupan keluarga pra sejahtera. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan periode pengamatan selama 3 (tiga) tahun yaitu 2016 – 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap keluarga pra sejahtera di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Eden, 2019) dengan judul “Analisis Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Nelayan Guna Meningkatkan Perekonomian Lingkungan Pesisir Sumatera Utara” dalam tugas akhir program studi diploma-III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana kehidupan perekonomian masyarakat di daerah pesisir Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang telah muncul memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pengelolaan lingkungan alam di Pesisir Sumatera Utara.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nafidah (2017) dengan judul “*Accountability of Village Fund Allocation Management in An Effort to Improve Community Development and Empowerment*” dalam *Journal of Accounting and Business*, Volume 1, Nomor 2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah berjalan dengan baik secara transparan dan akuntabel. Kemudian realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh (Murtala et al., 2021) dengan judul “*Analysis of Social Assistance and Grant Funds Toward Fisherman Income in Aceh Province*” dalam *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, Volume 11, Nomor 6, ISSN: 2222-6990. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dukungan sosial dan pemberian dana terhadap pendapatan nelayan di Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan dana mampu memberdayakan nelayan di Provinsi Aceh.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Suharsimi (2013) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Sugiyono (2016) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

3.2. Jenis Data

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan maka ada beberapa sumber data yang bisa dikumpulkan untuk menghasilkan informasi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.1. Data Primer

Fokus penelitian ini adalah pada data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Sugiyono (2016) Jenis data yang

digunakan adalah data dari hasil wawancara kepada narasumber kunci yang informasinya diperlukan untuk penelitian.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pelengkap bagi data primer yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (Sugiyono, 2016). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan alokasi anggaran Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2020. Data tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang melakukan pengalokasian anggarannya untuk dana bantuan masyarakat nelayan, realisasi anggarannya, serta bentuk pertanggungjawabannya terhadap anggaran DPPP Kota Tanjungpinang Tahun 2020.

Dalam penelitian ini data sekunder digunakan untuk memperkuat argumen dari analisis data primer yang dilakukan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber (Riduwan, 2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan dengan metode wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pertanyaannya telah disusun sebelumnya berdasarkan indikator penelitian dalam sebuah lembar

pedoman wawancara. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah pertanyaan wawancara yang muncul di luar pedoman wawancara dengan tujuan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya terhadap permasalahan yang sedang diteliti (Sugiyono, 2016).

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder penelitian. Penelitian mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen instansi dan bahan lainnya yang telah tersedia baik di objek penelitian maupun pada sumber lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2016).

3.4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian ini, karena dalam pengolahan data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Rumengan, 2015). Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil teknik pengolahan data untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pengolahan data dimulai dari mengumpulkan data dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk dianalisis.

Tahapan-tahapan dalam teknik pengolahan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.4.1. *Data Collection*

Menurut Rumengan (2015) data *collection* merupakan serangkaian aktifitas mengkoleksi data yang juga dikenal dengan proses menelaah data. Data

bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu observasi, wawancara, intisari dokumen, dan pita rekaman yang biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis. Tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Sehingga, data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk tulisan atau uraian.

3.4.2. Data Reduction

Reduksi data menurut Rumengan (2015) sebagai proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan mereduksi data dengan cara mengelompokkan data-data temuan hasil penelitian untuk menemukan poin penting yang merupakan informasi tentang alokasi dana bantuan pemberdayaan masyarakat nelayan pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

3.4.3. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi di lapangan dan memulai analisis yang mendalam.

3.4.4. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2016) menyebutkan langkah selanjutnya dalam mengolah data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penelitian menggunakan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian agar dalam menganalisis data penelitian mendapatkan suatu kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami serta berkaitan dengan berbagai sumber informasi yang diperoleh dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data yang tinggi. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang dapat digunakan adalah analisis data yang cocok untuk penelitian kualitatif.

Seperti dinyatakan oleh Miles and Huberman bahwa *“The most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate”* artinya yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan teori metodologi penelitian

kualitatif, maka untuk menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut:

3.5.1. Uji Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data dengan cara melakukan verifikasi sumber data yang diperoleh (Sugiyono (2016)).

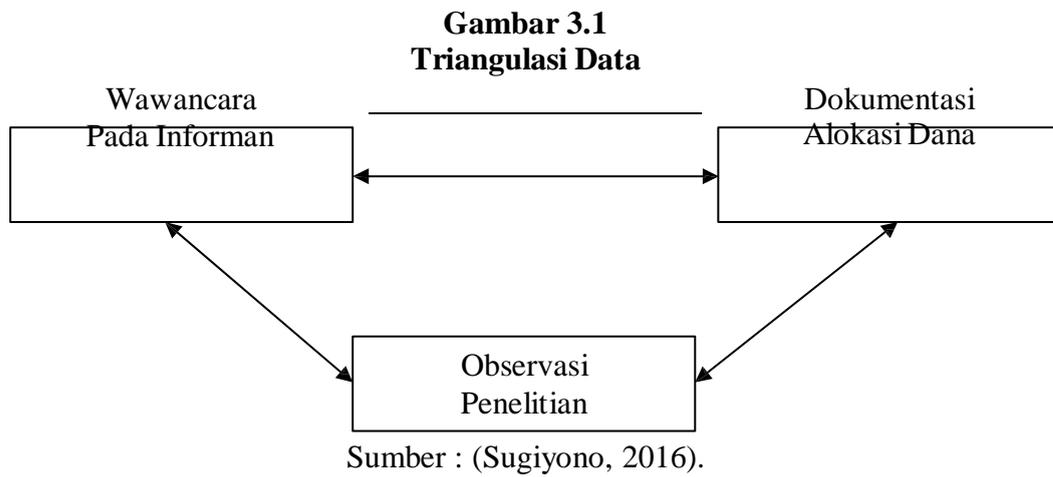
3.5.2. Triangulasi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triangulasi data dapat digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas atau validitas) dan konsistensi (*reability*) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

Dari berbagai macam triangulasi, pada penelitian ini triangulasi yang digunakan ialah triangulasi sumber. Triangulasi sumber ialah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber data. Dalam triangulasi sumber yang penting ialah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan dalam sebuah data. Dengan demikian, triangulasi sumber berarti membandingkan (mengecek ulang) informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan

hasil wawancara dengan dokumen yang ada, serta membandingkan dokumen yang ada dengan hasil pengamatan yang dilakukan (Sugiyono, 2013).



DAFTAR PUSTAKA

- Aljannah, S. (2017). Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *JOM Fekon*, 4(1).
- Andayani, R. (2015). Environmental Performance dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 11(2).
- Arnawa, I. K., Purnama, I. B., & Arisena, G. M. K. (2016). Dampak Bantuan Sarana Perikanan Tangkap Terhadap Peningkatan Pendapatan Nelayan di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Manajemen Agribisnis*, 4(1), 47–58.
- Bappenas. (2014). *Pedoman Penyusunan Indikator, Pemantauan, dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja*. Bappenas.
- Beneish, M. D., Lee, C. M. C., & Nichols, D. C. (2012). Fraud Detection and Expected Returns. *SSRN Working Paper*, 1–52. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1998387>
- Eden, R. N. (2019). *Analisis Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Nelayan Guna Meningkatkan Perekonomian Lingkungan Pesisir Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Hariati, I., & Rihatiningtyas, Y. W. (2017). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan*. Universitas Sumatera Utara.
- Jemmy, R., Muammar, K., & Feby, M. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Perdana Publishing.
- Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 2(4), 59–62.
- Permen KKP Nomor 63 Tahun 2020, Pub. L. No. Permen KKP Nomor 63 Tahun 2020 (2020).
- Marlina, L., & Ramadani. (2020). Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Keluarga Pra Sejahtera di Wilayah Pesisir Kabupaten Aceh Barat. *AKBIS*, 1(1), 1–10.
- Mulyadi. (2012). *Akuntansi Biaya* (Edisi Keli). STIE YKPN.
- Murtala, Chalirafi, Usman, U., & Abubakar, J. (2021). Analysis of Social Assistance and Grant Funds Toward Fisherman Income in Aceh Province. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 11(6), 1176–1185.
- Nafidah, L. N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal*

Akuntansi Dan Bisnis (Akmenbis), 1(2).

PP No.50 Tahun 2015, Pub. L. No. PP No.50 Tahun 2015 (2015).

Prakarsa, C. (2020). *Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Universitas Sriwijaya.

Purba, B. P. (2015). *Fraud dan Korupsi (Pencegahan, Pendeteksian, dan Pemberantasan)* (M. P. Manalu (ed.)). Lestari Kiranatama.

Putra, P. E. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*, 5(1), 1–14.

Riduwan, D. M. . . . (2012). *Skala pengukuran variabel- variabel penelitian*. ALFABETA.

Sugiarto. (2012). *Pengantar Akuntansi*. Universitas Terbuka.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. ALFABETA CV.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Suharsimi, A. (2013). Metodologi penelitian. In *bumi aksara*.

Sunyoto. (2013). *Metodologi Penelitian*. CAPS.

Suryana, N. K., & Bahari, S. (2020). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Nelayan Minapolitan Desa Tideng Pale Induk Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung). *J-PEN Borneo*, 2(2).

Yendrawati, R. (2013). *Akuntansi Keuangan lanjutan 1*. EKONISIA.

Curriculum Vitae



A. PERSONAL INFORMATION

Full Name : Zahrun Efendi
Gender : Male
Place and Date of Birth : Tanjungpinang, 18 Juni 1994
Citizen : Indonesia
Age : 28 years old
Present Address : Jl. Handjoyo Putro, Km. 9
Perumahan Nusa Indah Block F 125
Religion : Islam
Email : efendizahrun@gmail.com
Phone Number / WA : 0831 – 9100 – 2800

B. EDUCATIONAL BACKGROUND

TYPE OF SCHOOL	NAME OF SCHOOL	YEAR COMPLETED
Elementary School	SDN 006 Tanjungpinang Timur	2000-2006
Junior High School	SMPN 7 Tanjungpinang	2006-2009
Senior High School	SMAN 4 Tanjungpinang	2009-2012
University	STIE Pembangunan Tanjungpinang	2015-2022